

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA KOTA BEKASI
TAHUN 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	Persen (%)	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.54 Tahun 2010 bahwa perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.	Persentase usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD = $\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan dari masyarakat dalam musrenbang (kelurahan, kecamatan dan kota)}}{\text{Total kegiatan Belanja Langsung dalam RKPD}} \times 100\%$	Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang AP4EP) - Bappeda Kota Bekasi	Hasil perhitungan dari usulan kelurahan, kecamatan, dan Perangkat Daerah yang masuk ke Sistem E-Planning
2.	Meningkatnya responsivitas terhadap permasalahan pembangunan yang tercakup dalam dokumen perencanaan	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran pembangunan tingkat kota yang ditindaklanjuti dalam dokumen rencana pembangunan daerah	Persen (%)	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.54 Tahun 2010, bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan. Hasil evaluasi tersebut yang menghasilkan rekomendasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tingkat kota = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi RKPD yang ditindaklanjuti dalam dokumen rencana pembangunan tahun rencana}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi RKPD}} \times 100\%$	Bidang AP4EP - Bappeda Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Tim Monev, - Laporan Perangkat Daerah, - BA TAPD, - BA/Notulen, Briefing Wali Kota
3.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1 Persentase kesesuaian Program RENSTRA terhadap RPJMD	Persen (%)	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.54 Tahun 2010, bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan.	Persentase kesesuaian Program RENSTRA terhadap RPJMD = $\frac{\text{Jumlah program dalam RENSTRA yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah keseluruhan program dalam RPJMD}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, - Bidang Ekonomi dan SDA, - Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, - Bidang AP4EP Bappeda Kota Bekasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Renstra Perangkat Daerah - RPJMD Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		2 Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap RPJMD	Persen (%)	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.54 Tahun 2010, bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.	Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap RPJMD = $\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah keseluruhan program dalam RPJMD}} \times 100\%$	Bidang AP4EP - Bappeda Kota Bekasi	Renja dan RKPD Tahun Perencanaan
		3 Persentase kesesuaian Program RENJA terhadap RKPD	Persen (%)	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.54 Tahun 2010, bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan.	Persentase kesesuaian Program RENJA terhadap RKPD = $\frac{\text{Jumlah program dalam RENJA yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah keseluruhan program dalam RKPD}} \times 100\%$	- Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, - Bidang Ekonomi dan SDA, - Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, - Bidang AP4EP Bappeda Kota Bekasi.	Renja Perangkat Daerah dan BA Desk Renja
		4 Persentase kesesuaian Program APBD terhadap RKPD	Persen (%)	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.54 Tahun 2010, bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan.	Persentase kesesuaian Program APBD terhadap RKPD = $\frac{\text{Jumlah program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah keseluruhan program dalam RKPD}} \times 100\%$	- Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, - Bidang Ekonomi dan SDA, - Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, - Bidang AP4EP Bappeda Kota Bekasi.	APBD dan RKPD Tahun Berjalan
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Berdasarkan Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Bappeda adalah Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai responden dalam Survey Pelayanan Publik Bappeda.	Sekretariat	Hasil Survey Pelayanan Publik

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (0-30).	Sekretariat	Dari hasil evaluasi Nilai AKIP oleh Inspektorat
		3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen (%)	Berdasarkan Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa masyarakat berhak menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti = $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang disampaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Sekretariat	Hasil Perhitungan

Bekasi,

KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI



Ir. A. KOSWARA, M.P.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680405 199703 1 005